

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
MENURUT PENGELOUARAN

2015-2019



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR MENURUT PENGETAHUAN

2015-2019



Produk Domestik Regional Bruto

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Menurut Pengeluaran 2015-2019

ISBN: 978-602-333-081-2

No. Publikasi: 15060.2004

Katalog: 9302020.1506

Ukuran Buku: 21 x 29,7 cm

Jumlah Halaman: xii + 69 halaman

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Gambar Kover oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Sumber Kover:

<http://www.freepik.com/>

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dicetak oleh:

CV. Suber Digital Printing

PT. Akbar Nusantara Unggul

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Tim Penyusun

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menurut Pengeluaran 2015-2019

Pengarah:

Pangorian Marpaung, SE.

Pengolah Data:

Evetra Yane, S.ST

Penyusun:

Evetra Yane, S.ST

Editor:

Pangorian Marpaung, SE.

Choerul Umam

Pengumpul Data:

Evetra Yane, S.ST

Toni Hartadi

Syamsudin, SE

Ariyasmanto

Joko Sutejo

Tata Letak:

Choerul Umam

Infografis:

Choerul Umam

Cover:

Choerul Umam

Kata Pengantar

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian eksport dan impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDB menurut Lapangan Usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDB menurut Pengeluaran/*expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDB menurut pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerja sama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Muara Sabak, Mei 2020
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
Kabupaten Tanjung Jabung Timur,



Pangorian Marpaung, SE

Daftar Isi

Halaman

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Grafik	ix
Daftar Tabel.....	x
Daftar Lampiran	xii
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3
1.2 Perubahan Tahun Dasar PDRB.....	5
BAB II Metoda Estimasi dan Sumber Data	11
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT)	13
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT).....	15
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P).....	16
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).....	18
2.5 Perubahan Inventori (PI)	20
2.6 Ekspor - Impor	23
BAB III Tinjauan Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menurut PDRB Pengeluaran 2015-2019	25
3.1 Perkembangan PDRB Pengeluaran.....	27
3.2 Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran	33
BAB IV Perkembangan Agregat PDRB Pengeluaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015- 2019.....	45
4.1 PDRB (Nominal)	47
4.2 Perbandingan Pengeluaran PDRB Untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap Ekspor.....	48
4.3 Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB	48
4.4 Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB	49
4.5 Perbandingan Ekspor Terhadap PMTB.....	50
4.6 Perbandingan PDRB Terhadap Impor.....	50
4.7 Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan	51
4.8 Incremental Capital Output Ratio (ICOR).....	52

BAB V Penutup	53
Lampiran.....	57
Daftar Pustaka.....	67

Daftar Grafik

Halaman

Grafik 1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019.....	28
Grafik 2.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019	29
Grafik 3.	Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019.....	29
Grafik 4.	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019	31
Grafik 5.	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019.....	32

Daftar Tabel

Halaman

Tabel 1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019.....	27
Tabel 2.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019	28
Tabel 3.	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019.....	30
Tabel 4.	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019	31
Tabel 5.	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019	32
Tabel 6.	Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019	33
Tabel 7.	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019.....	34
Tabel 8.	Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019	35
Tabel 9.	Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019	36
Tabel 10.	Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019.....	37
Tabel 11.	Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019.....	37
Tabel 12.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019.....	39
Tabel 13.	Perkembangan dan Struktur PMTB, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019	41
Tabel 14.	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019	42
Tabel 15.	Perkembangan dan Struktur Ekspor, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019.....	43
Tabel 16.	Perkembangan dan Struktur Impor, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019	44
Tabel 17.	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per kapita, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019.....	47

Tabel 18. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Ekspor, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019.....	48
Tabel 19. Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019	49
Tabel 20. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019	49
Tabel 21. Perbandingan Ekspor terhadap PMTB, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019.....	50
Tabel 22. Perbandingan PDRB terhadap Impor, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019.....	50
Tabel 23. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019	51
Tabel 24. <i>Incremental Capital Output Ratio</i> , Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019.....	52

Daftar Lampiran

Halaman

Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB menurut Pengeluaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019 (Miliar Rupiah)	59
Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK menurut Pengeluaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019 (Miliar Rupiah)	60
Lampiran 3. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB menurut Pengeluaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019 (%)	61
Lampiran 4. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK menurut Pengeluaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019 (%)	62
Lampiran 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK menurut Pengeluaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019 (%)	63
Lampiran 6. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Pengeluaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019 (%)	64
Lampiran 7. Laju Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Pengeluaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019 (%)	65

BAB

01

PENDAHULUAN

Rp 24 . 696
PDRB A D H B
MILIA R R U P I A H

Rp 17 . 998
PDRB A D H K
MILIA R R U P I A H



LAJU PERTUMBUHAN
4 , 25

INDEKS IMPLISIT
137 , 22

LAJU IMPLISIT
- 1 , 82



1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*framework*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritorial suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoretis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metode pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang

¹Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

²Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)

tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini dilewatkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metode dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data PDRB Pengeluaran juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Mengaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk dieksport) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki

3. - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik

- Disebut sebagai pendekatan “riil”

- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb:

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
$GFCF$ (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan diatas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah brutodari hasil penghitungan PDRBProduksi akan “identik” dengan PDRBPengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan $GFCF$ serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara eksport dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antarwilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara eksport dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto” .

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA),

perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts*(SNA) adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasirekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables* (SUT) Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, makaperubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro(*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahantahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan(dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). CBR merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan

⁴SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

PMTB. Contohnilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.

- b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). MWS merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alatpertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
- c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). RnD merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti RnD tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
- d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). MEEmerupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*).Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
- f. Komputersoftware(*computer software and databases/CSD*).CSD merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunandatabases,yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). ELA merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metode FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). FISIMdihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan(deposits), bunga pinjaman(loans), dansuku bunga referensi (reference). Metode ini menggantikan metode *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- **Valuasi**

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- **Klasifikasi**

Klasifikasi yang digunakan adalah *International Standard Industrial Classification* (ISIC rev.4) dan *Central Product Classification* (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga 2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 4. Perubahan Inventori 5. Ekspor 6. Impor	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga 2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 5. Perubahan Inventori 6. Ekspor 7. Impor

```

graph LR
    A((Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga)) --> B1[Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga]
    A --> B2[Pengeluaran Konsumsi LNPRT]
    B((Pengeluaran Konsumsi Pemerintah)) --> C1[Pengeluaran Konsumsi Pemerintah]
    B --> C2[Pembentukan Modal Tetap Bruto]
    C((Pembentukan Modal Tetap Bruto))
    C --> D1[Perubahan Inventori]
    C --> D2[Ekspor]
    C --> D3[Impor]
    D((Perubahan Inventori))
    D --> E1[Perubahan Inventori]
    D --> E2[Ekspor]
    D --> E3[Impor]
    E((Ekspor))
    E --> F1[Ekspor]
    E --> F2[Impor]
    F((Impor))
    F --> G1[Impor]
  
```


BAB
02

METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA

NET EKSPOR



54,15 %

PENGELUARAN PEMERINTAH



5,24 %

PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA



25,00 %

PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO



14,66 %

DISTRIBUSI PERSENTASE
PDRB MENURUT PENGELUARAN 2019



2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PK-RT)

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran⁵. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu region. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose* (COICOP), sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furnitur, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

⁵Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumah tangganya relatif lebih rendah

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasikan komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumah tangga Triwulan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. Metode Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metodesbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per kapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku(atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan: Komponen PK-RT Triwulan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumah tangga triwulan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA (PK-LNPRT)

i. Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiridi dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumah tangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan dibawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii. Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimile; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah tangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasilup-dating direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metode Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metode sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatanhasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai event seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar hargaBerlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan: Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-bataseritorial suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakanbesarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri.Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesarnilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai,transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia.Nilai inimasih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang takterpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakupaktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksiunit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barangsemacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa,seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktik, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihiseluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagariyang ada di wilayah kabupaten/kota;b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasiPK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. Metode Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metode:

$$\text{PK-P atas dasar harga Berlaku} = \text{Output} - \text{Penjualan barang dan jasa} + \text{Social transfer in kind purchased market production} + \text{Output Bank Indonesia}$$

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
2. PK-P atas dasar harga Konstandiestimasi denganmen-*deflate*PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
<i>Social Transfer in kind</i>	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan;tumbuhan dan ternak;serta barang modal lainnya.

ii. Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii. Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv. Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS

- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

v. Metode estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metode langsung ataupun metode tidak langsung tergantung ketersediaan data dimasing-masing daerah.

- ✓ Metode Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor)= Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

- ✓ Metode Tidak Langsung:

Pendekatan *Supply*: PMTB atas dasar harga Berlaku = Total *Supply* Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi: PMTB atas dasar harga Konstan (t) = PMTB atas dasar harga konstan (t-1) x Indeks Produksi (t)

2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i. Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan

baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii. Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periodedengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumah tangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu

dibeli;

- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

- 1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- 2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
- 3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
- 4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
- 5. Data komoditas perkebunan;
- 6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
- 7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
- 8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ; dan data ternak, Ditjen Kementerian.

v. Metode Estimasi

Komponen Perubahan Inventori(PI) diestimasi dengan menggunakan metode revaluasi atau metode deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

- a. Metode Revaluasi

Metode ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI atas dasar harga Berlaku = Volume inventori(t) - Volume inventori (t-1) x Harga per unit

PI atas dasar harga Konstan = PI atas dasar harga Berlaku / IHPB

b. Metode Deflasi

Metode ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

$$\text{PI atas dasar harga Konstan} = \frac{\text{Inventori (t)atas dasar harga Berlaku/IHPB (t)} - \text{Inventori (t-1)atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)}}{\text{PI atas dasar harga Berlaku}} = \text{PI atas dasar harga Konstan} \times \text{IHPB rata-rata (t)}$$

2.6 EKSPOR - IMPOR

i. Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihilah kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan kesatu wilayah.

ii. Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii. Cakupan

Ekspor-Import ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor keluar provinsi/kabupaten/kota
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv. Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasinya tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metode tidak langsung.

BAB

03

TINJAUAN EKONOMI
KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR
MENURUT PDRB PENGETAHUAN 2015-2019

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

TAHUN 2019

Pengeluaran Konsumsi
LNPT

6,98



Net Ekspor

4,65



Pengeluaran Konsumsi
Pemerintah

5,12



Pembentukan Modal
Tetap Bruto

3,13

3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELOUARAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015,PDRB diestimasidengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010(2010=100) menggantikan tahun dasarlama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008.

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timurperiode 2015-2019dapat tetap tumbuh, yakni sebesar 1,81%; 2,65%; 3,07%;3,09%; dan 4,25%. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercerminbaik dari sisi produksi (*supply side*)maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kategori Informasi dan Komunikasi yang selalu tumbuh di atas 7% setiap tahunnya. Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur didominasi pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan rata-rata pertumbuhan selama lima tahun sebesar 13,42 persen.

Pada periode tahun 2015-2019 PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga Berlaku meningkat cukup signifikan, yakni minus 1.002,38 miliar Rupiah (2015); 935,33 miliar Rupiah (2016); 2.331,96 miliar Rupiah (2017); 3.085,63 miliar Rupiah (2018); dan 565,64 miliar Rupiah (2019). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode 2015-2019 dapat dilihat dari tabel 1 dan grafik 1 berikut ini:

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019

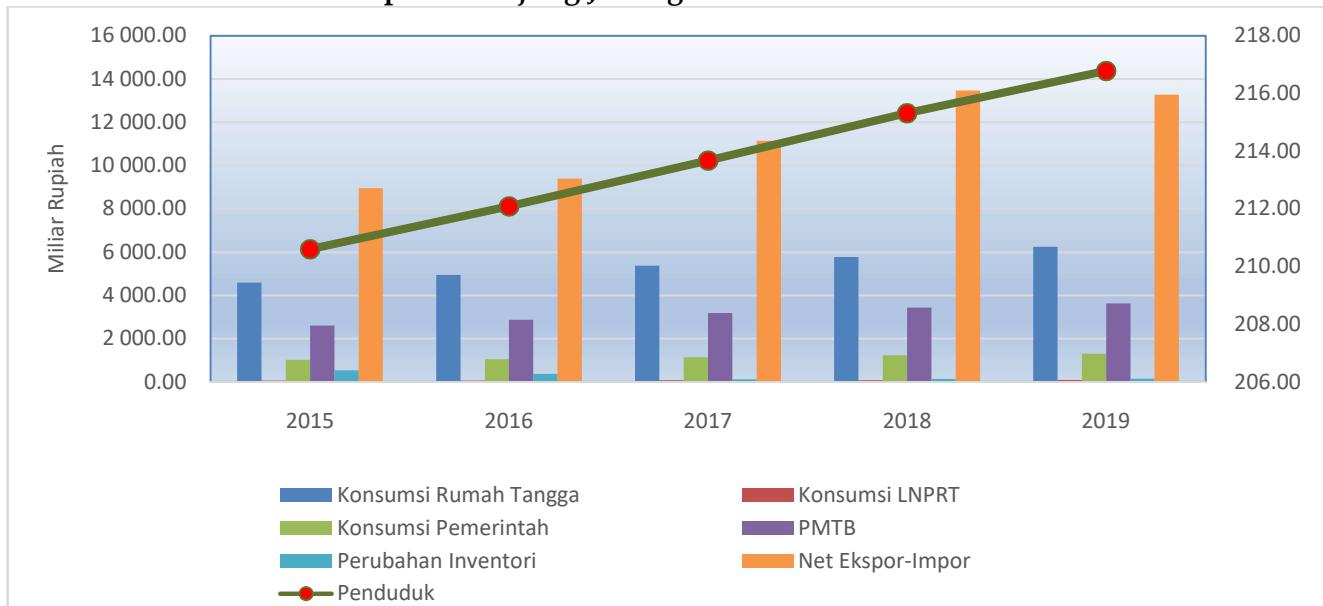
Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	(Miliar Rp) 2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4 586,17	4 942,86	5 378,53	5 771,84	6 244,29
2. Konsumsi LNPRT	61,49	65,57	72,65	83,15	90,91
3. Konsumsi Pemerintah	1 030,92	1 060,91	1 147,12	1 231,63	1 300,14
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2 607,21	2 877,53	3 184,52	3 432,07	3 634,65
5. Perubahan Inventori	543,10	369,36	122,51	138,27	150,45
6. Ekspor	14 382,36	15 145,61	17 377,56	19 886,69	19 896,52
7. Impor	5 434,40	5 749,66	6 198,77	6 413,88	6 621,54
PDRB	17 776,85	18 712,18	21 044,14	24 129,77	24 695,42

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Grafik 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019



Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode 2014-2018 dapat dilihat dari tabel 2 dan grafik 2 berikut ini:

Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019

Komponen Pengeluaran (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018* (5)	2019** (6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3 575,40	3 727,27	3 902,75	4055,18	4225,89
2. Konsumsi LNPRT	47,30	48,73	51,55	57,80	61,84
3. Konsumsi Pemerintah	719,08	713,78	747,62	782,15	822,93
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2 064,47	2 196,78	2 353,89	2448,58	2532,75
5. Perubahan Inventori	424,35	263,46	91,34	99,48	103,92
6. Ekspor	13 330,63	13 723,82	14 175,26	14546,97	15055,97
7. Impor	4 330,71	4 424,04	4 574,16	4725,03	4805,18
PDRB	15 830,52	16 249,80	16 748,26	17266,16	17998,11

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

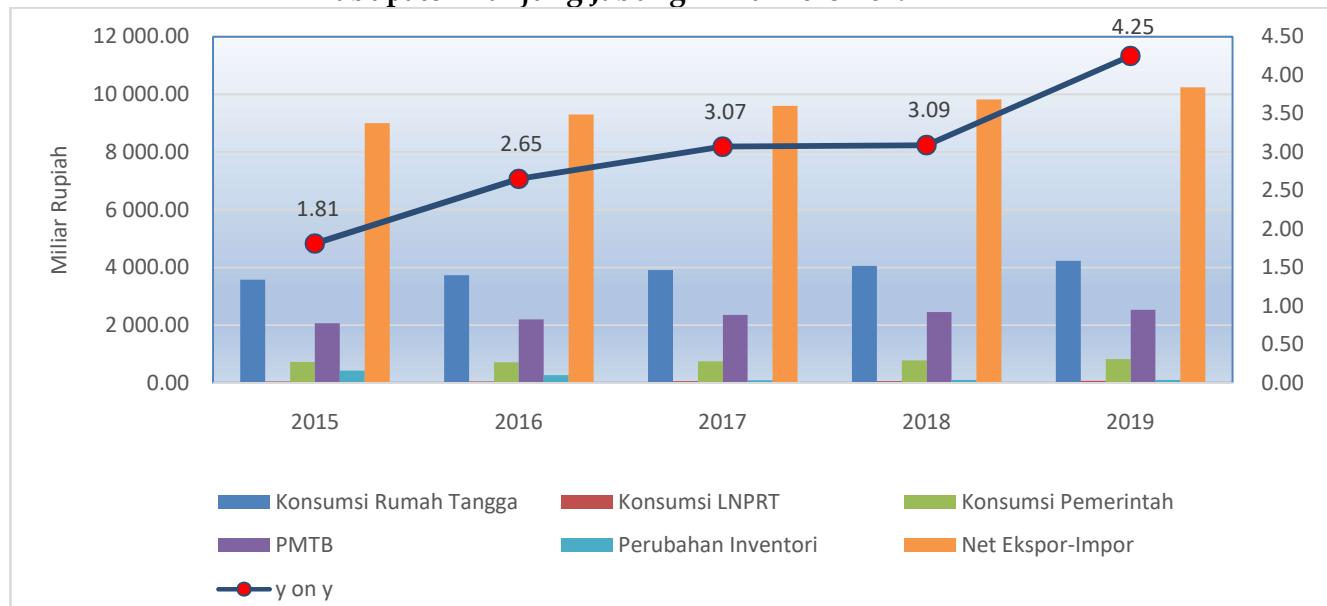
* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Dari tabel 2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Konstan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur meningkat, yakni minus 281,03 miliar Rupiah (2015); 419,28 miliar Rupiah (2016); 498,46 miliar

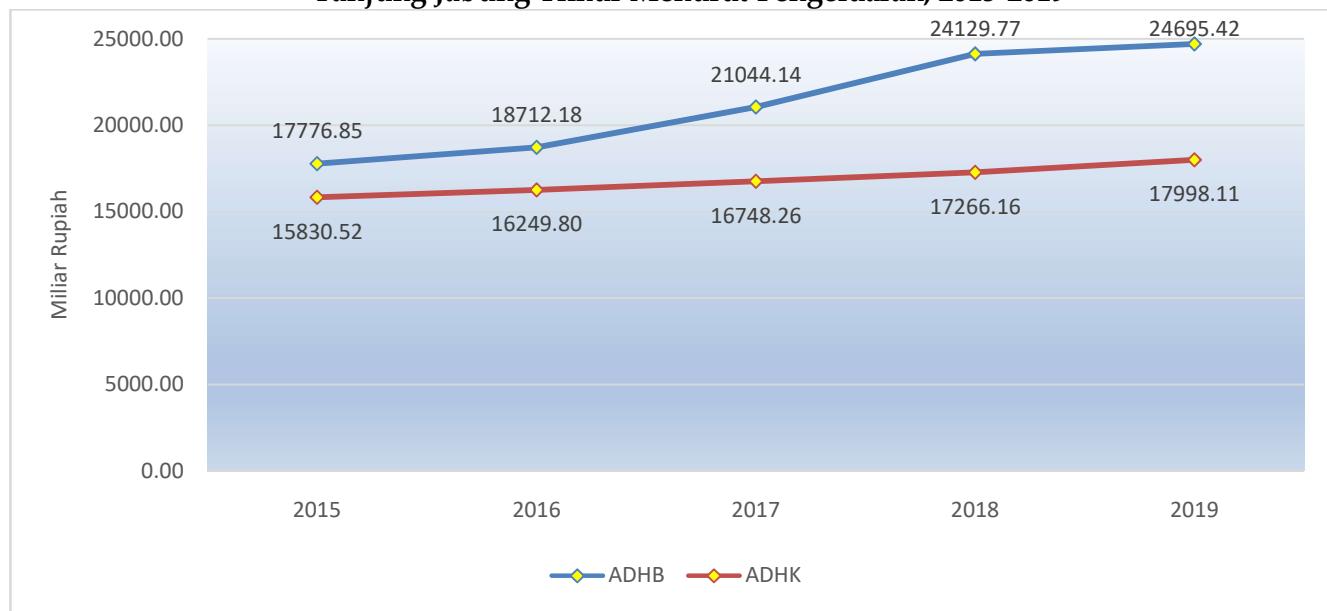
Rupiah (2017); 516,89 miliar Rupiah (2018); 732,96 miliar rupiah (2019). Sedangkan dari grafik 2, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur meningkat, yakni dari 1,81% pada tahun 2015 menjadi 4,25% pada tahun 2019.

Grafik 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019



Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Grafik 3. Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menurut Pengeluaran, 2015-2019



Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dari grafik 3, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDB atas dasar harga Konstan, pengaruh dari harga tersebut telah diatadakan. Sama halnya PDRB atas dasar harga Berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga Konstan juga menunjukkan peningkatan.

Tabel 3. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menurut Pengeluaran 2015-2019

Komponen Pengeluaran	2015 (1)	2016 (2)	2017 (3)	2018* (4)	2019** (5)
1. Konsumsi Rumah Tangga	25,80	26,42	25,56	23,92	25,29
2. Konsumsi LNPRT	0,35	0,35	0,35	0,34	0,37
3. Konsumsi Pemerintah	5,80	5,67	5,45	5,10	5,26
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	14,67	15,38	15,13	14,22	14,72
5. Perubahan Inventori	3,06	1,97	0,58	0,57	0,61
6. Ekspor	80,90	80,94	82,39	82,42	80,57
7. Impor	30,57	30,73	29,46	26,58	26,81
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

* Angka Sementara

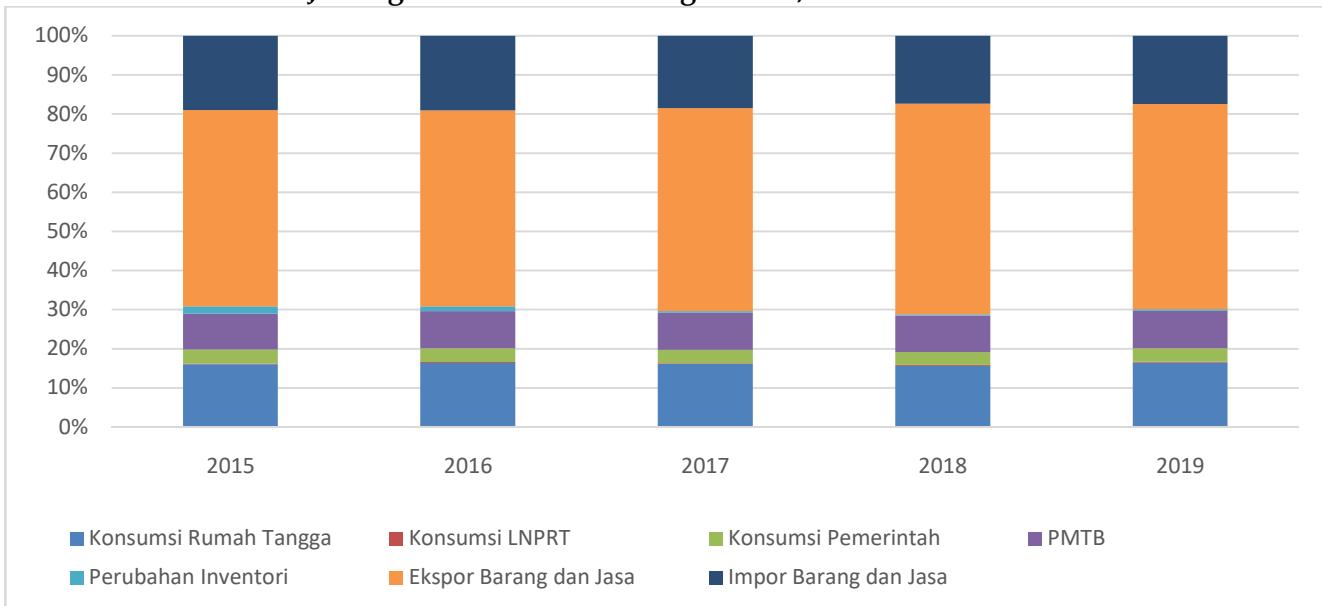
** Angka Sangat Sementara

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau eksport minus impor barang dan jasa.

Dari tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2015-2019, PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pengeluaran untuk konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) berkisar antara 23 s.d 25 persen. Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar,yakni sekitar 14 s.d 15 persen. Komponen eksport berkontribusi sekitar 80 s.d 82 persen, sedangkan komponen impor sebagai komponen pengurang dalam PDRB juga masih berkontribusi relatif besar, yakni sekitar 26 s.d 30 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa beberapa kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 5 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB tidak terlalu besar. Di sisi lain, perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh komponen eksport dan impor, menunjukkan eksport yang cenderung lebih tinggi dari impor. Kecenderungan tersebut menunjukkan posisi "surplus" atau menguntungkan. Hal itu tidak lain diakibatkan oleh besarnya eksport migas yang berasal dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Grafik 4. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menurut Pengeluaran, 2015-2019



Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3,47	4,25	4,71	3,91	4,21
2. Konsumsi LNPRT	9,25	3,04	5,78	12,13	6,98
3. Konsumsi Pemerintah	3,56	- 0,74	4,74	4,62	5,21
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	- 4,64	6,41	7,15	4,02	3,44
5. Perubahan Inventori					
6. Ekspor	3,20	2,95	3,29	2,69	3,50
7. Impor	5,09	2,16	3,39	3,30	1,70
PDRB	1,81	2,65	3,07	3,13	4,25

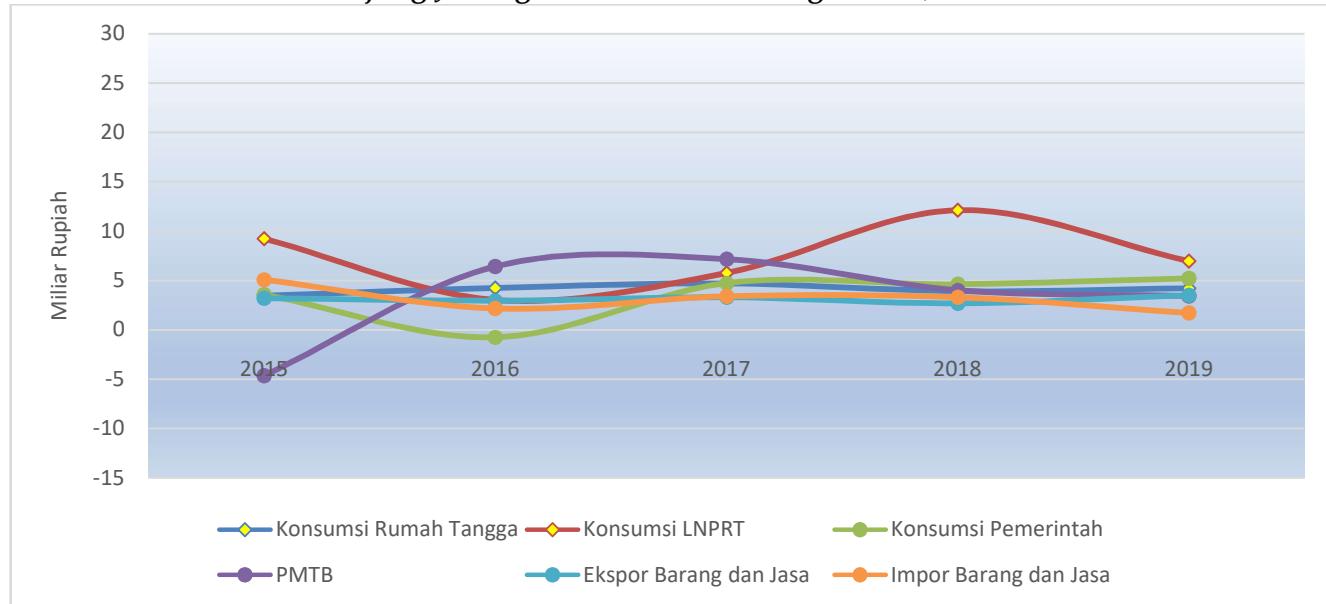
Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari tabel 4, selama periode tahun 2015-2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan, yakni sebesar 1,81 persen (2015); 2,65 persen (2016); 3,07 persen (2017); 3,09 persen (2018); dan 4,25 persen (2019). Sedangkan dari grafik 5 akan terlihat pertumbuhan masing-masing komponen PDRB selama periode tahun yang sama.

Grafik 5. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menurut Pengeluaran, 2015-2019



Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menurut Pengeluaran, 2015-2019

Komponen Pengeluaran (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018* (5)	2019** (6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	128,27	132,61	137,81	142,33	147,76
2. Konsumsi LNPRT	130,01	134,55	140,93	143,86	147,01
3. Konsumsi Pemerintah	143,37	148,63	153,44	157,47	157,99
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	126,29	130,99	135,29	140,17	143,51
5. Perubahan Inventori	127,98	140,20	134,13	138,99	144,78
6. Ekspor	107,89	110,36	122,31	136,71	132,15
7. Impor	125,49	129,96	135,52	135,74	137,80
PDRB	112,29	115,15	125,65	139,76	137,21

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Indeks implisit⁶ PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (rumah tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun eksport/impor. Dari tabel 5 akan terlihat tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2015-2019, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

⁶ Indeks perkembangan

Tabel 6. Sumber Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menurut Pengeluaran, 2015-2019

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	0,77	0,96	1,09	0,90	
2. Konsumsi LNPRT	0,03	0,01	0,02	0,04	
3. Konsumsi Pemerintah	0,16	- 0,03	0,21	0,21	
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	- 0,65	0,84	0,97	0,57	
5. Perubahan Inventori					
6. Ekspor	2,66	2,48	2,78	2,27	
7. Impor	1,35	0,59	0,92	0,90	
PDRB	1,62	3,66	4,15	3,08	

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELOUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 2015-2019.

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumah tangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga(PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar kedua setelah ekspor atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagian masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumahtangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*),yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan

dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2014-2018 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 7. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019

Uraian (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018* (5)	2019** (6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	4 586,17	4 942,86	5 378,53	5 771,84	6 244,29
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	3 575,40	3 727,27	3 902,75	4 055,18	4 225,89
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	25,80	26,42	25,56	23,92	25,29
Rata-rata konsumsi RT					
a. ADHB (Miliar Rp)	86,16	92,15	99,63	106,07	113,98
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	67,17	69,49	72,30	74,52	77,68
Rata-rata konsumsi Per kapita					
a. ADHB (Miliar Rp)	21,46	22,96	24,82	26,43	28,39
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	16,73	17,31	18,01	18,57	1935
Pertumbuhan ⁷					
a. Total konsumsi RT	2,74	3,45	4,05	3,07	8,19
b. Per kapita	2,70	3,45	4,06	3,07	4,21
Jumlah ruta (unit)	53 231	53 641	54 006	54 414	54 786
Jumlah penduduk (orang)	213 670	215 316	216 777	218 413	219 985

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Selama periode 2015-2019 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB fluktuatif, yaitu 25,80 persen (2015); 26,42 persen (2016); 25,56 persen (2017); 23,92 persen (2018); dan 25,29 persen (2019). Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 26,42 persen dan terendah pada tahun 2018 sebesar 23,92 persen.

Pada masa pemulihan ekonomi, biasanya institusi rumah tangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam inimemicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

⁷ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

Secara rata-rata, konsumsi per-rumahtangga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2015, setiap rumahtangga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghabiskan dana sekitar 86,16 juta Rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 92,15 juta Rupiah (2016); 99,63 juta Rupiah (2017); 106,07 juta Rupiah (2018); dan 113,98 juta Rupiah (2019). Sementara itu, atas dasar harga Konstan (2010) rata-rata konsumsi per rumah tangga tumbuh pada kisaran 4,3 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 8,19 persen.

Di sisi lain, kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Rata-rata konsumsi per-kapita secara "riil" meningkat pada kisaran 2,70 s.d 4,65 persen. Peningkatan tersebut tentu berpengaruh pada struktur konsumsi rumah tangga, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019⁸

Kelompok Konsumsi (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018* (5)	(%)	2019** (6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	43,87	44,30	44,28	44,44	44,37	
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,78	4,64	4,53	4,48	4,37	
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	13,18	13,22	13,56	13,53	13,57	
d. Kesehatan & Pendidikan	9,88	9,94	10,08	10,07	10,17	
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	25,98	25,77	25,51	25,53	25,65	
f. Hotel & Restoran	0,22	0,21	0,20	0,20	0,19	
g. Lainnya	2,09	1,92	1,83	1,75	1,67	
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Secara rata-rata dari tahun 2014 s.d 2018, tampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bahwa konsumsi bukan makanan tidak jauh berbeda dengan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada kisaran yang sama. Proporsi untuk makanan pada masing-masing tahun mencapai 44,55 persen (2014); 43,87 persen (2015); 44,30 persen (2016); 44,20 persen (2017); dan 44,44 persen (2018).

⁸Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Sungguhpun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

Tabel 9. Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019⁹

Kelompok Konsumsi (1)	(%)				
	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018* (5)	2019** (6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	2,66	3,57	4,25	4,77	4,20
b. Pakaian dan Alas Kaki	2,70	3,94	2,28	4,68	2,08
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5,93	6,09	6,19	4,05	5,44
d. Kesehatan & Pendidikan	4,33	5,22	5,72	2,78	4,57
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	3,45	4,46	4,96	3,07	4,16
f. Hotel & Restoran	2,11	3,73	4,49	2,24	1,11
g. Lainnya	3,93	0,33	2,68	1,00	1,21
Total Konsumsi	3,47	4,25	4,71	3,91	4,21

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, total pengeluaran rumah tangga untuk kelompok makanan dan bukan makanan terus meningkat, dengan masing-masing sebesar 3,47 persen (2015); 4,25 persen (2016); 4,71 persen (2017); 3,91persen (2018); dan 4,21 persen (2019). Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu. Sayangnya, perangkat data PDRB ini tidak dapat menunjukkan kelompok masyarakat mana yang menikmati kemakmuran tersebut.

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 10, menunjukkan peningkatan setiap tahunnya untuk masing-masing kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga. Peningkatan harga relatif tinggi terjadi pada tahun 2014yaitu sebesar 13,93 persen, pada harga kelompok Hotel dan Restoran. Rincian peningkatan harga pada kelompok makanan,

⁹Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar hargakonstan(ADHK)

minuman, dan rokok sebesar 9,98 persen (2013); 6,25 persen (2014); 3,03 persen (2015); 5,06 persen (2016); dan 4,38 persen (2017).

Tabel 10. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019

Kelompok Konsumsi	(%)				
	2015 (1)	2016 (2)	2017 (3)	2018* (4)	2019** (5)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	1,78	5,06	4,38	2,76	3,66
b. Pakaian dan Alas Kaki	(1,11)	0,63	2,77	2,50	3,71
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	9,68	1,89	5,17	2,85	2,92
d. Kesehatan & Pendidikan	7,52	3,07	4,38	4,30	4,48
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	(2,81)	2,37	2,67	4,13	4,39
f. Hotel & Restoran	11,05	(0,48)	1,94	2,88	4,77
g. Lainnya	12,15	(1,25)	1,14	1,32	2,37
Total Konsumsi	0,90	3,39	3,91	3,29	3,83

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019

U r a i a n	(%)				
	2015 (1)	2016 (2)	2017 (3)	2018* (4)	2019** (5)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	61,49	65,57	72,65	83,15	90,91
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	47,30	48,73	51,55	57,80	61,83
Proporsi terhadap PDRB (%) ADHB)	0,35	0,35	0,35	0,34	0,37
Pertumbuhan (ADHK 2010)	9,25	3,04	5,78	12,13	6,98

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2014-2018 mengalami (peningkatan) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2015 konsumsi LNPRT sebesar 61,49miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya yaitu 65,57

miliar rupiah (2016); 72,65 miliar rupiah (2017); 83,15 miliar rupiah (2018); dan 90,91 miliar rupiah (2019). Pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT tahun dasar 2010 berturut-turut adalah 9,25 persen (2015), 3,04 persen (2016); 5,78 persen (2017); 12,13 persen (2018); dan 6,98 persen (2019). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018.

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a)*Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b)*Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c)*Rivalries competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapa pun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah memiliki kecenderungan meningkat, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2015 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 1.030,92 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya sebesar 1.060,91 miliar rupiah (2016); 1.147,12 miliar rupiah (2017); 1.231,63 miliar rupiah (2018); dan 1.344,14 miliar rupiah (2019). Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas. Namun pada tahun 2016 sedikit mengalami penurunan yang disebabkan adanya penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB juga cenderung mengalami penurunan, dari 5,80 persen (tahun 2015) hingga mencapai 5,10

persen (tahun 2018) dan meningkat kembali menjadi 5,44 persen (tahun 2019). Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 5,10 persen; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2015 sebesar 5,80 persen.

Tabel 12. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019

Uraian	2015 (1)	2016 (2)	2017 (3)	2018* (5)	2019** (6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	1 030,92	1 060,91	1 147,12	1 231,63	1.344,14
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	719,08	713,78	747,63	782,15	824,93
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	5,80	5,67	5,45	5,10	5,44
Konsumsi Pemerintah Per kapita					
a. ADHB (Juta Rp)	4,82	4,93	5,29	5,64	
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	3,37	3,32	3,45	3,58	
Pertumbuhan ¹⁰					
Total konsumsi pemerintah	3,56	- 0,74	4,74	4,62	5,47
Jumlah penduduk (000 org)	213 670	215 316	216 777	218 413	

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktik, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2014 konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga berlaku sebesar 4,34 juta rupiah, terus meningkat pada tahun-tahun setelah itu, yaitu menjadi 4,82 juta rupiah (2015); 4,93 juta rupiah (2016); 5,06 juta rupiah (2017); dan mencapai 5,64 juta rupiah pada tahun 2018.

Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya, dengan masing-masing senilai 3,27 juta rupiah (2014); 3,37 juta rupiah (2015); 3,22 juta rupiah (2016); dan 3,31 juta rupiah (2017); dan.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara "riil" menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif. Dimulai dari pertumbuhan pada 2013 sebesar 8,73 persen, kemudian pada tahun-tahun berikutnya sebesar 2,95 persen (2014); 3,56 persen (2015); -3,52 persen (2016); dan 3,44 persen

¹⁰Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

(2017). Adanya pertumbuhan negatif pada tahun 2016 tidak lain disebabkan adanya penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (*kapital*)¹¹. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirectinput*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Proporsi bangunan terhadap total PMTB sedikit berfluktuasi selama periode 2015-2019. Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB tersebut. Proporsi bangunan pada tahun 2015 sebesar 66,33 persen kemudian pada tahun-tahun berikutnya sebesar 65,41 persen (2016); 65,83 persen (2017); 67,44 persen (2018); dan 67,74 persen pada 2019.

Pergerakan proporsi non bangunan terhadap total PMTB memiliki sifat yang berlawanan dengan bangunan, mengingat hanya dua kelompok inilah yang merupakan penentu PMTB. Ketika proporsi bangunan meningkat, proporsi non bangunan menurun, begitu pun sebaliknya. Proporsi non bangunan selama tahun 2015-2019 berturut-turut sebesar 33,67 persen (2015); 34,59 persen (2016); 34,17 persen (2017); 32,56 persen (2018); dan 32,26 persen (2019).

Secara total pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2015-2019 berfluktuasi dari 24,84 persen (2015) menjadi 5,89 persen (2019), sementara di tahun lainnya masing-masing 6,41 persen (2016); 7,15 persen (2017); dan 4,02 persen (2018).

Sementara jika dilihat pertumbuhannya, sub komponen bangunan menunjukkan pola yang nyaris konstan antar tahunnya. Dalam periode tahun 2015-2019 pertumbuhan bangunan berfluktuasi dari 4,37 persen (2015); 4,37 persen (2016); 8,09 persen (2017); 5,75 persen (2018); dan 6,07 persen (2019). Sedangkan non bangunan mengalami fluktuasi pertumbuhan dari 111,38 persen (2015); 10,66 persen (2016); 5,31 persen (2017); 0,53 persen (2018); dan 5,50 persen (2019).

¹¹ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun dieksport

Tabel 13. Perkembangan dan Struktur PMTB, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019

U r a i a n	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	2 607,21	2 877,53	3 184,52	3 432,07	3766,15
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	2 064,47	2 196,78	2 353,90	2 448,58	2592,75
Proporsi terhadap PDRB (%) ADHB	14,67	15,38	15,13	14,22	15,25
Struktur PMTB ¹²					
a. Bangunan					
(Miliar Rp)	1 730,06	1 882,12	2 096,58	2 314,75	2551,76
Proporsi terhadap total PMTB (%)	66,33	65,41	65,83	67,44	67,74
b. Non Bangunan					
(Miliar Rp)	877,15	995,41	1 087,94	1 117,31	1214,39
Proporsi terhadap total PMTB (%)	33,67	34,59	34,17	32,56	32,26
Pertumbuhan ¹³ (%)					
a. Bangunan	4,37	4,37	8,09	5,75	6,07
b. Non Bangunan	111,38	10,66	5,31	0,53	5,50
Total PMTB	24,84	6,41	7,15	4,02	5,89

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud ini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

¹²Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

¹³ Diturunkan dari perhitungan PDRBatas dasar harga konstan (ADHK 2010)

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada komponen pengeluaran lainnya.

Tabel 14. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019

Uraian	2015 (1)	2016 (2)	2017 (3)	2018* (4)	2019** (5)
Total Nilai Inventori					
ADHB (Miliar Rp)	543,10	369,36	122,51	138,27	150,45
ADHK 2010 (Miliar Rp)	424,35	263,46	91,34	99,48	103,92
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	3,06	1,97	0,58	0,57	0,61

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Pada tahun 2015 perubahan inventori atas dasar harga berlaku sebesar 543,10 miliar rupiah, yang kemudian naik pada tahun 2016 turun menjadi sebesar 369,36 miliar rupiah. Kemudian berturut-turut menjadi 122,51 miliar rupiah (2017); 138,27 miliar rupiah (2018); dan meningkat menjadi 150,45 miliar rupiah (2019).

Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015, proporsi perubahan inventori adalah 3,06 persen, kemudian berturut-turut 1,97 persen (2016); 0,58 persen (2017); 0,57 persen (2018); dan 0,61 persen (2019).

3.2.6. Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Secara total, dalam kurun waktu 2015-2019 nilai ekspor barang dan jasa menunjukkan fluktuasi setiap tahun. Pada tahun 2015 nilai ekspor barang dan jasa sebesar 14.382,36 miliar rupiah kemudian berturut-turut sebesar 15.145,61 miliar rupiah (2016); 17.335,58 miliar rupiah (2017); 19.886,69 miliar rupiah (2018); dan 19.715,61 miliar rupiah (2019). Sejalan dengan nilai ekspor atas dasar harga berlaku,

nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang sama, yaitu cenderung meningkat dengan nilai "riil" masing-masing tahun sebesar 13.330,63 miliar rupiah (2015); 13.723,82 miliar rupiah (2016); 14.173,26 miliar rupiah (2017); 14.546,99 miliar rupiah (2018); dan 14.990,43 miliar rupiah (2019). Sementara itu, pada periode 2015-2019, proporsi dalam PDRB justru cenderung stabil dari 80,90 persen pada tahun 2015 menjadi 79,83 persen di tahun 2019.

Tabel 15. Perkembangan dan Struktur Ekspor, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	14 382,36	15 145,61	17 337,58	19 886,69	19 896,52
ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	13 330,63	13 723,82	14 175,26	14 546,99	15 055,97
Proporsi terhadap PDRB (%) ADHB)	80,90	80,94	82,39	82,42	80,57
Pertumbuhan ¹⁴	3,20	2,95	3,29	2,62	3,50

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan riil total ekspor periode 2015 berkisar di angka 3,2 persen, menurun dibandingkan tahun 2014, yang mencapai 5,81 persen. Sementara itu, pada tahun lainnya, pertumbuhan ekspor pada masing-masing tahun adalah sebesar 2,95 persen (2016); 3,07 persen (2017); 2,62 persen (2018); dan 3,50 persen (2019).

3.2.7. Impor Barang dan Jasa

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungannya dengan cara mengurangkan nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan

¹⁴ Diturunkan dari perhitungan PDRB ADHK 2010

ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Tanjung Jabung Timur di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri.

Data pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa secara total nilai impor barang dan jasa Kabupaten Tanjung Jabung Timur cenderung meningkat (baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010) pada kurun tahun 2015-2019. Pada tahun 2015 nilai impor barang dan jasa atas dasar harga berlaku mencapai 5.434,40 miliar rupiah, kemudian berturut-turut menjadi 5.749,66 miliar rupiah (2016); 6.198,77 miliar rupiah (2017); 6.413,88 miliar rupiah (2018); dan 6.621,54 miliar rupiah (2019). Demikian juga dengan proporsinya, pada tahun 2015 impor barang dan jasa memberikan kontribusi sebesar 30,57 persen. Pada tahun berikutnya kontribusi impor barang dan jasa menjadi 30,73 persen (2016); 29,48 persen (2017); 26,58 persen (2018); dan 26,81 persen (2019).

Tabel 16. Perkembangan dan Struktur Impor, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
ADHB (Miliar Rp)	5 434,40	5 749,66	6 198,77	6 413,88	6 621,54
ADHK 2010 (Miliar Rp)	4 330,71	4 424,04	4 574,16	4 725,03	4 805,18
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	30,57	30,73	29,46	26,58	26,81
Pertumbuhan ¹⁵	5,09	2,16	3,39	3,30	1,70

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

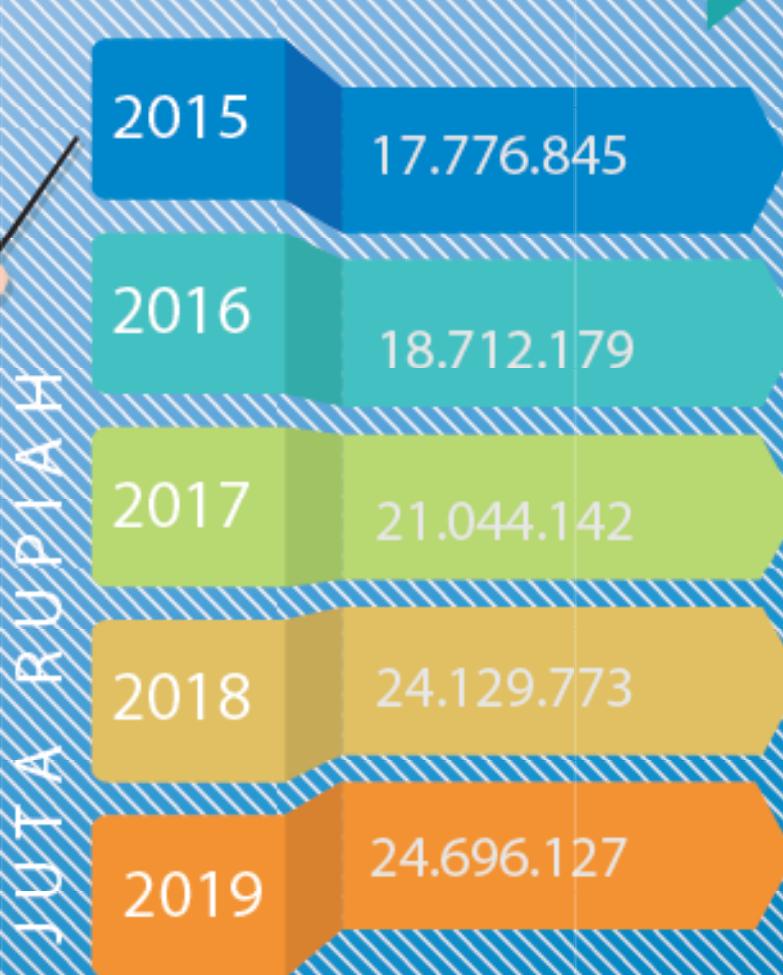
¹⁵ Diturunkan dari perhitungan PDRB ADHK 2010

BAB

04

PERKEMBANGAN AGREGAT
PDRB MENURUT PENGELOUARAN
KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR 2015-2019

PDRB ADHB TAHUN 2015-2019



Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB per kapita.

Tabel 17. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per kapita, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019

U r a i a n	2015 (1)	2016 (2)	2017 (3)	2018* (4)	2019** (5)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
ADHB	17 776,85	18 712,18	21 044,14	24 129,77	24 695,42
ADHK 2010	15 830,52	16 249,80	16 748,26	17 265,16	17 998,11
PDRB per kapita (Ribu Rp)					
ADHB	83 197,67	86 905,66	97 151,19	110 629,01	112 259,56
ADHK 2010	74 088,65	75 469,55	77 274,17	79 094,14	81 815,17
Pertumbuhan					
PDRB per kapita ADHK	1,81	2,65	3,07	3,09	4,25
Jumlah penduduk (orang)	213 670	215 316	216 777	218 413	219 985
Pertumbuhan	0,75	0,77	0,68	0,75	0,72

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

PDRB per kapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Tanjung Jabung Timur rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu pertumbuhan per kapita secara “riil” juga cenderung meningkat, walaupun berfluktuasi. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang

meningkat rata-rata pada kisaran 0,73 persen setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan per kapita tersebut tidak saja terjadi secara "riil" tetapi juga terjadi secara kualitas.

4.2 PERBANDINGAN PENGELOUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi RT di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang paling tinggi dalam penggunaan PDB Indonesia (sekitar 60 persen), yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Indonesia sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

Tabel 18. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Ekspor, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	4 586,17	4 942,94	5 378,53	5 771,84	6 244,29
Total Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	14 382,36	15 145,54	17 337,58	19 886,69	19 896,52
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	0,32	0,33	0,31	0,29	0,32

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Data di atas menunjukkan bahwa pada kurun waktu 2015-2019 nilai konsumsi rumah tangga dan nilai ekspor kian meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga lebih dari 0,32 kali dari yang diekspor, artinya sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik diekspor, hanya sebagian yang diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir ruta. Rasio perbandingan konsumsi ruta terhadap ekspor mengalami fluktuatif setiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 0,30 kali. Dalam tiga tahun terakhir rasio perbandingan tersebut mengalami peningkatan. Hal tersebut diakibatkan oleh turunnya nilai ekspor di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (utamanya dari komoditi minyak dan gas), sedangkan konsumsi rumah tangga semakin meningkat.

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAPPMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas tampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Indonesia digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

**Tabel 19. Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB,
Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019**

U r a i a n	2015	2016	2017	2018*	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	4 586,17	4 942,86	5 378,53	5 771,84	6 244,29
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	2 607,21	2 877,53	3 184,52	3 432,07	3 634,65
Perbandingan Konsumsi RT terhadap PMTB	1,76	1,72	1,69	1,68	1,72

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sama halnya terhadap ekspor, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB juga berfluktuatif, dari sebesar 1,76 pada tahun 2015, kemudian berturut-turut menjadi 1,72 (2016); 1,69 (2017); 1,68 (2018); dan 1,72 (2019). Hal ini terjadi karena adanya peningkatan nilai investasi secara signifikan.

4.4 PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

**Tabel 20. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB,
Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019**

U r a i a n	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir ADHB (Miliar Rp)					
Rumah tangga	4 586,17	4 942,94	5 378,53	5 771,84	6 244,29
LNPRT	61,49	65,57	72,65	83,15	90,91
Pemerintah	1 030,92	1 060,91	1 147,12	1 231,63	1 300,14
J u m l a h	5 678,58	6 069,42	6 598,31	7 086,63	7 635,34
PDRB ADHB (Miliar Rp)	17 776,85	18 712,18	21 044,14	24 129,77	24 695,42
Proporsi	31,94	32,44	31,35	29,37	30,92

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sebagian barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir. Konsumsi akhir semakin meningkat setiap tahunnya, hal tersebut sejalan dengan proporsi terhadap PDRB. Produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau ekspor) masih berperan besar di wilayah domestik, namun proporsinya semakin berkurang. Hal tersebut diakibatkan turunnya nilai ekspor dalam dua tahun terakhir.

4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar wilayah. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara disisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio eksport terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk eksport dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Pada periode tahun 2014-2018 eksport Kabupaten Tanjung Jabung Timur selalu mempunyai nilai yang jauh lebih tinggi dari PMTB. Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk eksport) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Dari rasio tersebut bisa diinterpretasikan bahwa kenaikan eksport masih jauh lebih pesat dibandingkan dengan kenaikan PMTB.

Tabel 21. Perbandingan Eksport terhadap PMTB, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Eksport (ADHB) (Miliar Rp)	14 382,36	15 145,61	17 337,58	19 886,69	19 896,52
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	2 607,21	2 877,53	3 184,52	3 432,07	3 634,65
Perbandingan Eksport terhadap PMTB	5,52	5,26	5,44	5,79	5,47

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh negara lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

Tabel 22. Perbandingan PDRB terhadap Impor, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	17 776,85	18 712,18	21 044,14	24 129,77	24 695,42
Total Impor (ADHB) (Miliar Rp)	5 434,40	5 749,66	6 198,77	6 413,88	6 621,54
Perbandingan PDRB terhadap Impor	3,27	3,25	3,39	3,76	3,73

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Pada periode tahun 2015-2019 rasio PDRB terhadap impor berfluktuatif, berada pada kisaran 3,25 hingga 3,76. Rasio tersebut berturut-turut sebesar 3,27 (2015); 3,25 (2016); 3,39 (2017); 3,76 (2018); dan 3,73 (2019). Peningkatan rasio menunjukkan berkangnya ketergantungan PDRB terhadap produk impor.

4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

Tabel 23. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Penyediaan PDRB (ADHB)					
(Miliar Rp)	17 776,85	18 712,18	21 044,14	24 129,77	24 695,42
(%)	76,59	76,50	77,25	79,00	78,86
Total Impor (ADHB)					
(Miliar Rp)	5 434,40	5 749,66	6 198,77	6 413,88	6 621,54
(%)	23,41	23,50	22,75	21,00	21,14
Total Permintaan Akhir					
(Miliar Rp)	23 211,25	24 461,84	27 242,91	30 543,65	31 316,96
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar kabupaten, dengan rentang 21 s.d 23 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 76 hingga 78 persen dari selisih hasil produksi domestik. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan (akhir) masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, dari 23.211,25 miliar (2015) menjadi sebesar 31.316,96 miliar rupiah (2019).

Di sisi lain “penyediaan” produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik masing-masing sebesar 17.776,85 miliar rupiah (2015); 18.712,18 miliar rupiah (2016); 21.044,14 miliar rupiah (2017); 24.129,77 miliar rupiah (2018); dan 24.695,42 miliar rupiah (2019)). Karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa diimpor, dengan nilai masing-masing tahun sebesar 5.434,40 miliar rupiah (2015); 5.749,66 miliar rupiah (2016); 6.198,77 miliar rupiah (2017); dan 6.413,88 miliar rupiah (2018); dan 6.621,54 miliar rupiah (2019).

4.8 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO(ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t
 Y_t = Output tahun ke t
 Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Tabel 24. Incremental Capital Output Ratio Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK) (Miliar Rp)	15 830,52	16 249,80	16 748,26	17 275,19	17 998,11
Perubahan (Miliar Rp)	281,02	419,28	498,46	523,92	732,96
PMTB (ADHK) (Miliar Rp)	2 064,47	2 196,78	2 353,90	2 448,58	2 532,75
ICOR	7,35	5,24	4,72	4,67	3,46

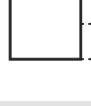
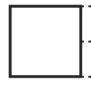
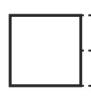
Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Pada periode 2015-2019 nilai ICOR Kabupaten Tanjung Jabung Timur berfluktuasi, berada pada kisaran 3,46 hingga 7,35. Besaran ICOR tertinggi terjadi pada tahun 2015, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2019. Pada tahun 2019 nilai ICOR Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 3,46; artinya untuk memperoleh penambahan PDRB 1 miliar rupiah maka dibutuhkan investasi sebesar 3,46 miliar rupiah.

Penutup



1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2015-2019 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk dan rumah tangga), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk *series* data dari tahun 2015-2019, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb.) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap ekonomi luar daerah.

LAMPIRAN



Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB menurut Pengeluaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019 (Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.586,17	4.942,86	5.380,53	5.771,84	6.174,29
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	2.012,13	2.189,49	2.382,71	2.565,13	2.770,59
b. Pakaian dan Alas Kaki	219,35	229,43	243,56	258,74	272,61
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah tangga	606,61	653,54	729,83	781,05	817,63
d. Kesehatan dan Pendidikan	453,03	491,30	542,16	581,22	635,06
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	1.191,29	1.273,89	1.372,74	1.473,30	1.561,93
f. Hotel dan Restoran	9,98	10,30	10,97	11,54	11,99
g. Lainnya	95,79	94,90	98,56	100,86	104,48
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	61,49	65,57	72,65	83,15	90,91
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.030,92	1.060,91	1.147,12	1.231,63	1.295,14
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.607,21	2.877,53	3.184,52	3.432,07	3.619,65
a. Bangunan	1.730,06	1.882,12	2.096,58	2.314,75	2.459,26
b. Non-Bangunan	877,15	995,41	1.087,94	1.117,31	1.160,39
5. Perubahan Inventori	543,10	369,36	122,51	138,27	143,16
6. Ekspor	14.382,36	15.145,61	17.351,58	19.886,69	19.994,52
7. Impor	5.434,40	5.749,66	6.198,77	6.413,88	6.621,54
PDRB	17.776,85	18.712,18	21.044,14	24.129,77	24.696,13

Sumber : BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK menurut Pengeluaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019 (Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.575,40	3.727,27	3.904,75	4.055,18	4.205,39
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	1.499,29	1.552,81	1.618,86	1.696,04	1.767,23
b. Pakaian dan Alas Kaki	188,11	195,52	201,98	209,33	213,67
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah tangga	432,72	459,07	487,47	507,24	524,84
d. Kesehatan dan Pendidikan	374,64	394,20	416,75	428,34	447,94
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	998,12	1.042,63	1.094,30	1.127,89	1.164,82
f. Hotel dan Restoran	7,11	7,37	7,70	7,88	7,97
g. Lainnya	75,42	75,67	77,69	78,47	78,92
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	47,29	48,73	51,55	57,80	61,84
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	719,08	713,78	747,63	782,15	822,93
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.064,47	2.196,78	2.353,89	2.448,58	2.525,25
a. Bangunan	1.395,99	1.457,03	1.574,88	1.665,47	1.716,58
b. Non-Bangunan	668,48	739,75	779,01	783,11	808,67
5. Perubahan Inventori	424,35	263,46	91,34	99,48	104,42
6. Ekspor	13.330,63	13.723,82	14.176,26	14.546,99	15.083,47
7. Impor	4.330,71	4.424,04	4.574,16	4.725,03	4.805,18
PDRB	15.830,52	16.249,80	16.748,26	17.265,16	17.998,11

Sumber : BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 3. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB menurut Pengeluaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019 (%)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	25,80	26,42	25,57	23,92	25,00
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	11,32	11,70	11,32	10,63	11,22
b. Pakaian dan Alas Kaki	1,23	1,23	1,16	1,07	1,10
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah tangga	3,40	3,49	3,47	3,24	3,31
d. Kesehatan dan Pendidikan	2,55	2,63	2,58	2,41	2,57
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	6,70	6,81	6,52	6,11	6,32
f. Hotel dan Restoran	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
g. Lainnya	0,54	0,51	0,47	0,42	0,42
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,35	0,35	0,35	0,34	0,37
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,80	5,67	5,45	5,10	5,24
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	14,67	15,38	15,13	14,22	14,66
a. Bangunan	9,73	10,06	9,96	9,59	9,96
b. Non-Bangunan	4,93	5,32	5,17	4,63	4,70
5. Perubahan Inventori	3,06	1,97	0,58	0,57	0,58
6. Ekspor	80,90	80,94	82,38	82,42	80,96
7. Impor	30,57	30,73	29,46	26,58	26,81
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 4. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK menurut Pengeluaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019 (%)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	22,59	22,94	23,31	23,49	23,37
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	9,47	9,56	9,67	9,82	9,82
b. Pakaian dan Alas Kaki	1,19	1,20	1,21	1,21	1,19
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah tangga	2,73	2,83	2,91	2,94	2,92
d. Kesehatan dan Pendidikan	2,37	2,43	2,49	2,48	2,49
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	6,31	6,42	6,53	6,53	6,47
f. Hotel dan Restoran	0,04	0,05	0,05	0,05	0,04
g. Lainnya	0,48	0,47	0,46	0,45	0,44
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,30	0,30	0,31	0,33	0,34
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,54	4,39	4,46	4,53	4,57
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	13,04	13,52	14,05	14,18	14,03
a. Bangunan	8,82	8,97	9,40	9,65	9,54
b. Non-Bangunan	4,22	4,55	4,65	4,54	4,49
5. Perubahan Inventori	2,68	1,62	0,55	0,58	0,58
6. Ekspor	84,21	84,46	84,64	84,26	83,81
7. Impor	27,36	27,23	27,31	27,37	26,70
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Lampiran 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK
menurut Pengeluaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019 (%)**

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,47	4,25	4,76	3,85	3,70
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	2,70	3,57	4,25	4,77	4,20
b. Pakaian dan Alas Kaki	5,93	3,94	3,30	3,64	2,08
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah tangga	4,33	6,09	6,19	4,05	3,47
d. Kesehatan dan Pendidikan	3,45	5,22	5,72	2,78	4,57
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	2,11	4,46	4,96	3,07	3,27
f. Hotel dan Restoran	3,93	3,73	4,49	2,24	1,11
g. Lainnya	9,25	0,33	2,68	1,00	0,57
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	18,48	3,04	5,78	12,13	6,98
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	13,26	-0,74	4,74	4,62	5,21
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	24,84	6,41	7,15	4,02	3,13
a. Bangunan	4,37	4,37	8,09	5,75	3,07
b. Non-Bangunan	111,38	10,66	5,31	0,53	3,26
5. Perubahan Inventori	-19.739,07	-37,92	-65,33	8,92	4,96
6. Ekspor	-13,62	2,95	3,27	2,64	3,69
7. Impor	-5,68	2,16	3,39	3,30	1,70
PDRB	1,81	2,65	3,07	3,09	4,25

Sumber : BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 6. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Pengeluaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019 (%)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	128,27	132,61	137,79	142,33	146,82
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	134,21	141,00	147,18	151,24	156,78
b. Pakaian dan Alas Kaki	116,61	117,34	120,59	123,60	127,58
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah tangga	139,72	142,36	149,72	153,98	155,79
d. Kesehatan dan Pendidikan	120,92	124,63	130,09	135,69	141,77
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	119,35	122,18	125,44	130,63	134,09
f. Hotel dan Restoran	140,34	140,67	142,38	146,48	150,61
g. Lainnya	127,01	125,42	126,86	128,53	132,39
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	130,01	134,55	140,93	143,86	147,01
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	143,37	148,63	153,44	157,47	157,38
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	126,29	130,99	135,29	140,17	143,34
a. Bangunan	123,93	129,17	133,13	138,99	143,27
b. Non-Bangunan	131,22	134,56	139,66	142,68	143,39
5. Perubahan Inventori	127,98	140,20	134,13	138,99	137,10
6. Ekspor	107,89	110,36	122,31	136,71	132,56
7. Impor	125,49	129,96	135,52	135,74	137,80
PDRB	112,29	115,15	125,65	139,76	137,22

Sumber : BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 7. Laju Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Pengeluaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019 (%)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	0,90	3,39	3,91	3,29	3,25
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	1,78	5,06	4,38	2,76	3,66
b. Pakaian dan Alas Kaki	-1,11	0,63	2,77	2,50	3,22
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah tangga	9,86	1,89	5,17	2,85	1,17
d. Kesehatan dan Pendidikan	7,52	3,07	4,38	4,30	4,48
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	-2,81	2,37	2,67	4,13	2,65
f. Hotel dan Restoran	11,05	-0,48	1,94	2,88	2,82
g. Lainnya	12,15	-1,25	1,14	1,32	3,00
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,45	3,49	4,75	2,07	2,19
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,32	3,67	3,23	2,63	-0,06
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,35	3,72	3,28	3,61	2,26
a. Bangunan	2,27	4,23	3,06	4,40	3,08
b. Non-Bangunan	-5,65	2,55	3,79	2,16	0,57
5. Perubahan Inventori	13,15	9,54	-4,33	3,62	-1,35
6. Ekspor	-9,78	2,29	10,83	11,77	-3,03
7. Impor	1,79	3,57	4,27	0,17	1,52
PDRB	-7,02	2,55	9,12	11,23	-1,82

Sumber : BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

DAFTAR PUSTAKA



1. Badan Pusat Statistik,*Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
3. *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
4. *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
5. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
6. HostPoul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, PamphletSeries, No. 29, Washington DC, 1979.
7. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
8. , *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
9. , *Handbook of National Accounting for Production, Sources and Methods*, Series F No. 39, New York, 1986.
10. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerja sama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
11. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.



Sensus
Penduduk
2020

DATA MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Jl. Diponegoro Komplek Perkantoran Bukit Menderang
Pemkab Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak
Telp. 0740 - 7370044
Homepage : <http://tanjabtimkab.bps.go.id>
Email : bps1506@bps.go.id

ISBN 978-602-333-081-2

9 786023 330812